

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan keuangan yang dilakukan pada instansi pemerintah wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan di dasarkan perencanaan strategis yang sudah di tetapkan. Dalam rangka pertanggung jawaban tersebut pemerintah menerapkan system laporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Laporan keuangan merupakan salah satu upaya reformasi dan pengembangan di bidang akuntansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pemerintah diharapkan dapat mengelola keuangan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayah pemerintahan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar laporan keuangan lebih akuntabel dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan.

Menurut penelitian purba (2017) tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintahan daerah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap laporan kinerja keuangan pemerintahan daerah. Laporan keuangan pemerintah kota/daerah (Pemko/Pemda) harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) seperti yang diamatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU No 1 Tahun 2004 yang menyatakan kepala organisasi perangkat daerah pengguna anggaran, pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD dilingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Standar Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Preside selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Pemerintah menetapkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur sistem pengendalian intern baru ditetapkan pada tahun 2008 yaitu PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Pada tahun 2013 mengungkapkan sebanyak 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.589 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian. Rekomendasi BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset dan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara atau daerah. Berdasarkan rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI atau tindakan administratif dan tindakan korektif lainnya.

Banyak penelitian yang menjelaskan hubungan empiris penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Aditya Sanjaya (2017) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten kamper, sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan.

Jurnal penelitian oleh Putu Cita Ayu, Ni Putu Ayu Kusumawati (2020) “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Gianyar” dengan hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengendalian intern yang ada pada pemerintah, sebagainya standar operating procedure yang sudah ada agar lebih tingkatkan lagi dan selalu memperbaiki SOP sesuai dengan perkembangan dan pembukuannya ketika ada perubahan untuk menjadi SOP sebagai alat untuk bekerja dan mencapai tujuan.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan laporan kinerja keuangan membutuhkan kompetensi dan memahami aturan serta pedoman penyusunan laporan kinerja keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Sebagaimana dalam pelaksanaan tugas dengan profesional, efektif dan efisien dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan data Kinerja Laporan Keuangan Kabupaten Flores Timur tahun 2013 – 2014.

Tabel 1.1  
Kinerja Laporan Keuangan Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2021

Tahun	Keterangan	Perkembangan	
		Realisasi (Rp)	%
2019	APBD	1.117.694.586.641,00	98,39 %
2020	APBD	856.050.356.368,00	73,83 %
2021	APBD	1.063.980.000,00	95,14%

Sumber: Kinerja Laporan Keuangan Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2021

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas Realisasi APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 sebesar Rp. 1.117.694.586.641,00 dengan persentase

98,39%, pada Tahun 2020 realisasi APBD sebesar 856.050.356.368,00 dengan presentase 73,83% dan pada Tahun 2021 Realisasi APBD sebesar 1.063.980.000,00 dengan presenasi 95,14 %.

Berdasarkan data diatas maka penelitian melakukan penelitian pada Kabupaten Flores Timur ini ingin melihat Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerinta dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

## **1.2.Rumusan Masalah penelitian**

Berdasarkan uraian pemikiran diatas “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur”.

## **1.3.Persoalan Penelitian**

Untuk menjelaskan masalah yang diteliti, maka menjadi persoalan penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh penetapan standar akuntansi pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Flores Timur?
2. Apakah ada pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Flores Timur?
3. Apakah ada pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan pemerintahan Kabupaten Flores Timur?

## **1.4.Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Flores Timur.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

1. Kemanfaatan Akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman akan teori yang berhubungan dengan manajemen yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada UKAW pada umumnya dan Fakultas Ekonomi secara khusus.

## 2. Kemanfaatan Praktis

### 1. Bagi Pemerintah daerah

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah agar menjadi timbangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur.

### 2. Bagi pengembangan ilmu

Penelitian diharapkan dapat memberikan referensi mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintahan terhadap kinerja laporan keuangan pemerintah Kabupaten Flores Timur.